

ANALISIS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PELABUHAN IKAN(PPI) TANAH BERU KABUPATEN BULUKUMBA

Andre Aleksander Chandra, Nurul Hijrah Bahar, Fadhil Julyardiansyah, Aqila Magfirah, Irianto Kande, dan Rakin Firas

Departemen Teknik Kelautan, Universitas Hasanuddin

Email: andrechandra755@gmail.com

Abstrak

Pelabuhan perikanan harus memiliki tujuan atau arah menuju pelabuhan yang bersih dan nyaman, dengan memiliki fungsi sebagai pengendali lingkungan seperti kebersihan, keamanan, ketertiban, keselamatan kerja dan keindahan, termasuk di Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru. Konsep dasarnya adalah mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi dengan lingkungan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis 1) kondisi fasilitas PPI Tanah Beru yang terkait dengan konsep pelabuhan berbasis ecoport, 2) kesesuaian kondisi PPI Tanah Beru dengan standar ecoport, dan 3) menentukan strategi pengembangan Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru menuju ecoport. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif yang bersifat survei. Metode analisis data menggunakan analisis tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan, tingkat kelengkapan fasilitas pelabuhan, lingkungan fisik ekologi, dampak sosial dan ekonomi masyarakat, penanganan komoditas ikan (hasil tangkapan), pemantauan illegal fishing, kesesuaian PPI Tanah Beru terhadap rumusan standar ecoport dan pengembangan road map. Penelitian ini menghasilkan indeks ecoport sebesar 1,76 maka perlu adanya peningkatan, pada komponen kualitas perairan pelabuhan, tingkat kebersihan kawasan, kondisi penghijauan (aspek lingkungan fisik ekologi); pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja (aspek dampak sosial dan ekonomi masyarakat); organoleptik, sistem rantai dingin (aspek penanganan komoditas ikan (hasil tangkapan)); alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pemantauan penangkapan ikan oleh observer (aspek illegal fishing). Strategi pengembangan PPI Tanah Beru difokuskan pada komponen yang selama ini belum mencapai nilai maksimal, dari hal ini disusun dalam bentuk road map yang meliputi rencana jangka pendek dan jangka menengah (pembangunan dan pengoperasian IPAL, pengerukan kolam pelabuhan).

Kata Kunci: *analisis pengembangan; ecoport; PPI Tanah Beru*

PENDAHULUAN

Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Pelabuhan Pembangunan Ikan (PPI) selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar [2] Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru. Pentingnya sebuah pelabuhan yang berwawasan ramah lingkungan (ecoport) agar pelabuhan dapat mencegah, mengolah, dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas pelabuhan perikanan itu sendiri dengan suatu cara, upaya, atau langkah yang sistematis untuk membangun dan memelihara pelabuhan yang bersifat ramah lingkungan. Pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport) dapat mengurangi permasalahan lingkungan yang ada di pelabuhan seperti rendahnya mutu air laut, rendahnya mutu udara dan kebisingan yang di sebabkan dari limbah pabrik dan suara dari mesin industri pengolahan, rusaknya keanekaragaman hayati yang disebabkan buruknya kualitas air dan udara, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, limbah kapal, cagar budaya, serta tingginya resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pelabuhan serta masyarakat di pelabuhan secara sistematis dirancang untuk diatasi, diimplementasikan, dipantau, dikaji ulang, dan kemudian diimplementasikan kembali oleh pihak manajemen pelabuhan [1]. Beberapa pelabuhan perikanan di Indonesia banyak yang belum melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, salah satunya Pelabuhan Ikan Di Tanah Beru hal ini yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitar pelabuhan perikanan. Pelabuhan Ikan Tanah Beru ini menampung kegiatan masyarakat perikanan, terutama terhadap aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, serta pembinaan masyarakat nelayan. Diharapkan bahwa pelabuhan perikanan yang telah beroperasi atau beraktivitas tidak akan memberikan hasil yang berdampak kepada lingkungan seperti pencemaran air laut, udara serta kerusakan lingkungan.



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi fasilitas di Pelabuhan ikan Tanah Beru yang terkait dengan konsep pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport); menganalisis kondisi Pelabuhan Ikan Tanah Beru sesuai dengan konsep standar indeks pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport); dan menentukan strategi pengembangan Pelabuhan Ikan menuju pelabuhan berwawasan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Ikan Tanah Beru yang terletak Di Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif yang bersifat survei. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang [6]. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap obyek berupa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang, kondisi kebersihan kawasan pelabuhan, kondisi hasil tangkapan perikanan di Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) terletak di Tanah Beru, Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru

Fasilitas pokok merupakan fasilitas yang wajib ada di suatu pelabuhan perikanan yang memegang peranan penting bagi kegiatan operasional pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan tambat labuh. Fasilitas Pokok di Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru memiliki 9 fasilitas pokok yaitu lahan, dermaga, jetty, penahan gelombang, kolam pelabuhan, jalan lingkungan, drainase, groin dan turap yang berkondisi baik hanya saja kolam pelabuhan memiliki kondisi yang kurang baik dikarenakan terdapat pendangkalan sebesar 250.000 m³ [3]. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru memiliki 9 fasilitas yaitu gedung TPI, kantor pelabuhan, kantor bina mutu, tower dan pompa air, bangsal perbaikan jaring, Guest House, gudang, dan SPBN, instalasi listrik yang berkondisi baik hanya saja penggunaan bangsal perbaikan jaring digunakan sebagai tempat parkir. Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung aktifitas operasional pelabuhan perikanan yang secara tidak langsung membantu peranan dari suatu pelabuhan perikanan [14]. Fasilitas Penunjang di Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru memiliki 8 fasilitas yaitu rumah dinas, balai pertemuan nelayan, mess karyawan, MCK, kantor pelayanan satu atap, pos satpam, waserba, dan musholla yang berkondisi baik, tetapi fasilitas MCK dalam kondisi kurang baik.

Analisis Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru

Analisis tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan adalah perhitungan perbandingan antara kapasitas yang terpasang dengan kapasitas yang dimanfaatkannya, sehingga dapat diketahui apakah fasilitas yang digunakan sudah melebihi, sama dengan atau masih dibawah kapasitas yang terpasang. Kolam pelabuhan adalah daerah perairan pelabuhan yang digunakan untuk kolam pendaratan ikan, kolam perbekalan dan kolam untuk masuknya kapal yang akan bersandar di dermaga. Berdasarkan pengukuran luas kolam pelabuhan didapatkan hasil tingkat pemanfaatannya sebesar 18,29 %, yang menyatakan bahwa tingkat pendayagunaan fasilitas belum mencapai optimal dikarenakan berbagai macam faktor, salah satu faktornya adalah luas kolam yang sudah luas dan ukuran kapal yang tidak terlalu panjang dan lebar [8]. Kedalaman kolam sangat berpengaruh terhadap draft kapal yang ingin bersandar di kolam pelabuhan jika suatu pelabuhan memiliki kedalaman lebih besar dibandingkan draft kapal maka kapal dapat bersandar di kolam pelabuhan tetapi jika kedalaman kolam pelabuhan memiliki kedalaman lebih kecil dibandingkan draft kapal maka kapal tidak dapat bersandar di kolam pelabuhan. Berdasarkan pengukuran kedalaman kolam pelabuhan didapatkan hasil tingkat pemanfaatannya sebesar 185%, yang menyatakan bahwa tingkat pendayagunaan fasilitas melampaui kondisi optimal dikarenakan berbagai macam faktor [12]. Hal ini dikarenakan pendangkalan kolam pelabuhan, karena tidak adanya dorongan sedimen yang berada didalam kolam pelabuhan keluar kolam pelabuhan. Pendangkalan kolam pelabuhan disebabkan tidak berfungsinya breakwater dan kurang panjangnya breakwater kearah laut yang seharusnya minus 30 meter, hal ini yang mengakibatkan tidak adanya gelombang atau arus yang masuk untuk mendorong sedimen keluar kolam pelabuhan, sehingga tidak terjadinya flushing atau perputaran arus didalam kolam pelabuhan yang mengakibatkan kolam pelabuhan menjadi sediman trap atau pendangkalan, serta berpengaruh terhadap kualitas air di kolam pelabuhan. Dermaga merupakan salah satu bagian dalam suatu fasilitas pokok pelabuhan perikanan



yang berfungsi sebagai tempat tambat dan labuhnya kapal, bongkar muat hasil tangkapan ikan, dan sebagai tempat mempersiapkan perbekalan untuk keperluan penangkapan ikan di laut [13]. Berdasarkan pengukuran panjang dermaga didapatkan hasil tingkat pemanfaatannya sebesar 79 %, yang menyatakan bahwa tingkat pendayagunaan fasilitas belum mencapai optimal. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang kepelabuhan perikanan pasal (7) huruf (a) bahwa Pelabuhan Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru harus memiliki kriteria teknis dengan panjang dermaga sekurang- kurangnya 150 m [7]. TPI merupakan salah satu bagian dalam suatu fasilitas fungsional pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai tempat yang biasanya terletak di dalam pelabuhan perikanan yang beraktifitas sebagai tempat penjualan hasil perikanan yang ditangkap secara lelang maupun tidak. Berdasarkan pengukuran panjang dermaga didapatkan hasil tingkat pemanfaatannya sebesar 3,04 %, yang menyatakan bahwa tingkat pendayagunaan fasilitas belum mencapai optimal [11]. Analisis tingkat kelengkapan fasilitas pelabuhan perikanan merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang di suatu pelabuhan perikanan sudah ada dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya, atau sudah ada tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, selain itu untuk mengetahui kebutuhannya sudah melebihi atau belum melebihi batas. Analisis tingkat kelengkapan fasilitas pelabuhan perikanan di Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru didapatkan skor PP sebesar: Skor PP = (0,50 x f. pokok) + (0,33 x f. fungsional) + (0,17 x f. penunjang) = (0,50 x 3) + (0,33 x 2) + (0,17 x 3) = 1,5 + 0,66 + 0,51 = 2,67. Dari hasil perhitungan skor penilaian fasilitas Pelabuhan Perikanan (PP) didapatkan hasil sebesar 2,67 yang artinya tingkat kelengkapan fasilitas Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru memiliki fasilitas baik [10].

ANALISIS PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN BERWAWASANA LINGKUNGAN (ECOPORT)

Analisis lingkungan fisik ekologi pelabuhan perikanan.

Analisis lingkungan fisik ekologi pelabuhan perikanan meliputi metode analisis kualitas perairan pelabuhan perikanan, dan Metode analisis tingkat kebersihan kawasan pelabuhan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) [9]. Analisis lingkungan fisik ekologi pelabuhan merupakan analisis yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu pelabuhan perikanan dalam melaksanakan kegiatan operasional pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Analisis data kualitas air yang akan dilakukan adalah memprakirakan bagaimana kualitas air setelah menerima limbah dari kegiatan pelabuhan kemudian dibandingkan dengan baku mutu penggolongan air [4]. Selanjutnya ditelaah bagaimana kemungkinan dampak/pengaruhnya terhadap berbagai pemanfaatan di daerah sekitar pelabuhan. Kualitas perairan pelabuhan perikanan dapat dilihat pada tabel nilai indeks pencemaran (IP) atau Pollution Index (PI) yang didasarkan terhadap evaluasi nilai PI menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 yang dimodifikasi Berdasarkan Perhitungan nilai PI didapatkan nilai sebesar 4,62. Nilai tersebut, menunjukkan bahwa kondisi perairan di sekitar Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru termasuk dalam kelas cemar ringan (Skor 2) [5].

Tabel 1. Perhitungan Nilai Indeks Pencemaran (IP) [5]

No	Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij baru
1	TSS	220	50	4,4	4,21
2	BOD	372,49	75	4,96	4,47
3	COD	760,44	100	7,60	5,40
4	pH	5,6	6 - 9	0,74	0,74
				(Ci/Lij)R	3,70
				(Ci/Lij)M	5,40
				PI	4,62

Dalam bidang kebersihan kawasan pelabuhan perikanan, Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru pada tahun 2015 memiliki personil kebersihan sebanyak 11 orang, didalam kantor pelabuhan dan di luar kantor pelabuhan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, persentase jumlah sarana dan prasarana kebersihan yang dimiliki Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru sebanyak 70% dari kebutuhan dan volume sampah yang terangkut ke TPA sebesar 80%, sehingga membuat Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru berada pada kategori kondisi kebersihan yang baik (Skor 2).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut: Kondisi fasilitas pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan ecoport di Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru antara lain yaitu: tidak adanya pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tempat pembuangan sementara (TPS) keadaan kurang terawat dan mandi, cuci, kakus (MCK) dalam kondisi baik. Hasil analisis kesesuaian Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru sebagai pelabuhan perikanan berbasis ecoport sesuai dengan indeks ecoport adalah Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru belum termasuk kategori pelabuhan ecoport, karena hanya mendapatkan nilai skor sebesar 1,76 yang memiliki arti perlu adanya peningkatan untuk menuju pelabuhan perikanan ecoport dalam aspek lingkungan fisik ekologi pelabuhan (kualitas perairan, kebersihan kawasan, dan ruang terbuka hijau); aspek sosial dan ekonomi kemasyarakatan disekitar pelabuhan perikanan (pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja); aspek penanganan komoditas ikan (hasil tangkapan) (organoleptik dan sistem rantai dingin); aspek pemantauan IUU Fishing (alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan pemantauan ikan oleh observer); dan

Strategi pengelolaan pelabuhan perikanan menuju pelabuhan berbasis ecoport pada Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru adalah dengan menyusun analisis road map, dengan perencanaan pembangunan dalam dua periode, yaitu jangka pendek (1-5 tahun), dan jangka menengah (6-10 tahun).

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Sebaiknya dibangun fasilitas pengolahan limbah (IPAL) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) agar tidak ada pencemaran lingkungan dari limbah dan sampah yang dihasilkan. Sebaiknya pengerukan kolam pelabuhan dilaksanakan agar kapal dapat bersandar dan berlabuh di dermaga pelabuhan. Semua pihak mulai dari pemerintah, pengelola pelabuhan, dan masyarakat penggunaan pelabuhan perikanan turut berpartisipasi untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan (ecoport);

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Perikanan. 1981. Standar Rencana Induk Dan Pokok-Pokok Desain Untuk Pelabuhan Perikanan Dan Pangkalan Pendaratan Ikan. PT. Incone, Jakarta, 169 hlm.
- [2] FAO. 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries. FAO Fisheries Department. 24 hlm.
- [3] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Pedoman Penentuan Status Mutu Air. 10 Juli 2003, Jakarta.
- [4] Lubis, E. 2002. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor, 71 2012. Pelabuhan Perikanan. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor, 199 hlm
- [5] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Pedoman Penentuan Status Mutu Air. 10 Juli 2003, Jakarta.
- [6] Nazir, M. 2014. Metode Penelitian. Edisi Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 486 hlm.
- [7] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012. Kepelabuhanan Perikanan. 20 April 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440, Jakarta.
- [8] Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2014. Upah Minimum Kabupaten/Kota. 21 November 2014. Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 69, Denpasar
- [9] Santara G, F Purwangka, dan B Hascaryo. 2014. Pengembangan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Ecoport) dalam Rangka Pengelolaan Pesisir Terpadu, Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Priok. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 274 hlm.
- [10] Suherman A dan A Dault. 2009. Analisis Pengembangan Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan yang Berwawasan Lingkungan (Ecoport) di PPP Bajomulyo, Pati, Jawa Tengah [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro, Semarang, 161 hlm.
- [11] Suryawan, A.G. 2004. Karakteristik Perubahan Mutu Ikan Selama Penanganan Oleh Nelayan Tradisional Dengan Jaring Rampus (Studi Kasus di Kaliadem, Muara Angke, DKI Jakarta). [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor, 93 hlm.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. 25 Maret 2003. Jakarta
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Penataan Ruang. 26 April 2007. Lembaran Negara
- [14] Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Jakarta.

